

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA, TRANSPARANSI, KELEMBAGAAN DESA, KEBIJAKAN DESA,  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT**

**(Studi pada desa-desa di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana**



**Disusun Oleh:**

**Ernawan Septia Putri Ussholehah**

**112031291**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA  
JANUARI, 2024**

## TUGAS AKHIR

### PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, TRANSPARANSI, KELEMBAGAAN DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Studi pada desa-desa di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ERNAWAN SEPTIA PUTRI USSHOLEHAH**

Nomor Induk Mahasiswa: 112031291

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing

Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., M.S.A., Ak., CA.

Penguji

Atika Jauharria Hatta, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 5 Januari 2024  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua

Wahnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, TRANSPARANSI, KELEMBAGAAN DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**(Studi pada desa-desa di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman)**

*Ernawan Septia Putri Ussholehah*

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara  
Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,  
Yogyakarta, 55281

Email: [putriernawan@gmail.com](mailto:putriernawan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, jumlah responden adalah 181 orang. Jenis data yang digunakan adalah data data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, kelembagaan desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta secara bersama- sama semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kelembagaan Desa, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat**

### **I. PENDAHULUAN**

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang menjadi tolak ukur pencapaian keberhasilan segala kegiatan pemerintah. Kedudukan desa menjadi unit terpenting karena sebagian besar dari wilayah yang berada di Indonesia ada di pedesaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan kegiatan dan program pembangunan yang akan dicapai oleh pemerintah pusat, maka desa harus mendapatkan perhatian secara khusus. Pemerintah berupaya untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara memprioritaskan kegiatan pembangunan, baik pembangunan daerah maupun pembangunan desa.

Guna memberikan dukungan untuk kegiatan dan program pembangunan di Indonesia, pemerintah pusat dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah Kabupaten/Kota mendistribusikan ADD untuk desa dengan menggunakan uang dari alokasi keuangan yang dibagi antara pusat dan daerah secara proposional paling sedikit 10% (sepuluh persen). 30% dari ADD digunakan untuk menutup biaya operasional, sementara 70% dialokasikan untuk mendukung kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat. ADD yang diberikan oleh pemerintah pusat tentu menjadi tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelolanya. Pemberian dana ini merupakan wujud nyata dalam upaya penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan, kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung program fisik dan non fisik. Program fisik itu meliputi perbaikan balai desa, perbaikan irigasi, perbaikan jalan, dan semenisasi. Program non-fisik mencakup aspek pendidikan, taraf pendapatan masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan. Apabila suatu organisasi dapat melaksanakan rencana tindakan, menentukan pilihan, atau menetapkan suatu kebijakan, maka organisasi tersebut dapat disebut akuntabel. Pihak pemberi Amanah mempunyai tanggung jawab meminta pertanggungjawaban kepada pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas disebut akuntabilitas Mardiasmo (2002)

Transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka. Dalam pengelolaan ADD, transparansi mencakup pemberian informasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bagi masyarakat mempunyai hak mengetahui informasi secara terbuka dan menyeluruh. Kuswanti & Kurnia (2020). Salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur dan terbuka adalah transparansi. Konsep keterbukaan memastikan bahwa masyarakat menerima informasi dari pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Kebijakan desa adalah pedoman yang dibuat oleh perangkat pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas-tugas di bawah pengawasan pemerintah Kabupaten atau Kota. Kebijakan desa juga dapat mempengaruhi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diikuti berbeda di setiap desa, hal ini

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

disebabkan karena kebijakan desa dikembangkan berdasarkan banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat. Implementasi kebijakan desa yang telah ditetapkan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan lembaga desa. Pengelolaan alokasi dana desa mulai dari penganggaran hingga pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Penanganan alokasi dana desa diluar kewenangan aparat desa dan kurang kontrol dapat menjadi masalah bagi pemerintah desa.

## II. TINJAUAN TEORI

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori Keagenan (*Agency Theory*) melibatkan keterkaitan dua pihak antara pemberi kuasa (*Principal*) dan penerima kuasa (*agent*). *Agent* adalah orang yang diserahi tanggung jawab untuk melakukan kegiatan atas nama pihak lain yang disebut *principal*. *Principal* adalah entitas yang memberikan izin kepada agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan kemudian memantau kinerja agen dari tugas-tugas tersebut. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara *agen* dengan *principal*.

Dalam penelitian ini, pemerintah sebagai agen yang akan diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan dan masyarakat sebagai *principal* yang memiliki hak untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

ADD merupakan keuangan yang berasal dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak minimal 10% (sepuluh persen) dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah mengatur kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola desa yang disesuaikan pada kebutuhan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Permendagri No. 37 tahun 2007 pasal 18 terkait Pengelolaan ADD. Peraturan penggunaan dana desa mencakup pengalokasian 30% untuk operasional pemerintah desa dan 70% untuk mendukung dana kegiatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan dan kinerja dalam melaksanakan misi organisasi dan memiliki kewajiban untuk melaporkan. Akuntabilitas dijelaskan sebagai tanggung jawab untuk menyampaikan pertanggungjawaban terkait kinerja dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya, serta komitmen untuk menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama, sebagaimana diatur dalam Permendagri No.113 tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas merupakan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip *good governance*.

## **Transparansi**

Transparansi mencakup keterbukaan dalam menyajikan informasi keuangan secara jelas dan terang kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat berhak memahami secara lengkap mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan. Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang penjelasan transparansi merupakan manifestasi dari keterbukaan yang keberfahaman kepada masyarakat untuk mendapatkan hak akses informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

## **Kelembagaan Desa**

Kelembagaan Desa merupakan struktur organisasi yang berfungsi sebagai tempat keaktifan masyarakat desa, berperan sebagai mitra bagi pemerintah desa. Desa mendayakan kelembagaan desa untuk membantu dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan di desa, membina masyarakat, dan memberdayakan mereka. Kelembagaan desa bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat desa melalui partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, hal ini termaktup di Undang-Undang No.6 tahun 2014.

## **Kebijakan Desa**

Kebijakan merupakan peraturan dan pedoman yang diikuti dan ditegakkan saat melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan desa merupakan salah satu produk hukum meskipun cakupan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wilayahnya kecil, karena pemerintah desa memiliki hak dan wewenang hukum yang mencakup wilayah administrasinya. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan berlaku untuk wilayah desa tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perancangan peraturan desa.

## **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan yang diwakilkan melalui lembaga kemasyarakatan. Peran masyarakat berdampak terhadap proses penilaian dan pengawasan kinerja pemerintah yang dapat mengurangi kemungkinan penyelewengan wewenang. Partisipasi masyarakat pada proses pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang positif serta mendorong komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi tersebut memiliki dampak pada pengelolaan keuangan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dalam berpartisipasi proses pengelolaan ADD, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi. Pengelolaan ADD bukan hanya aparatur pemerintah saja tetapi juga mengikutsertakan masyarakat.

## **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang mewakili taraf hidup masyarakat yang menerminkan taraf hidup masyarakat dengan memenuhi kebutuhan sosial, material, dan spiritual serta mampu memaksimalkan kegunaannya sesuai dengan tingkat batas anggaran. Masyarakat sejahtera jika indikator penting yang menjadi tolak ukur terpenuhi yakni, mencakup hunian yang memenuhi standar, kebutuhan pakaian dan pangan. Artinya mencukupi, pendidikan yang terjangkau, dan layanan kesehatan berkualitas.

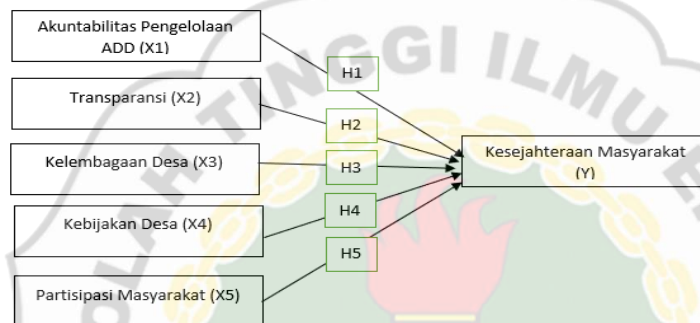
## **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa-Desa Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah dibawah Kapanewon Prambanan, Sleman. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Purposive Sampling, kriteria sampel pada penelitian ini adalah

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

seseorang yang telah menjabat di pemerintah desa minimal 1 tahun dan mengetahui tentang program alokasi dana desa.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapat langsung dari kuisioner. Data penelitian ini didapat dengan cara menyebarkan kuisioner secara langsung kepada aparat desa yang berada pada Desa-Desa Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Hubungan antar variabel independent dan variabel dependen dapat digambarkan sebagai berikut:



## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Kapanewon Prambanan adalah sebuah Kapanewon yang terletak di Kabupaten Sleman. Yang memiliki luas wilayah 24,43km<sup>2</sup> dan terdiri dari 6 Desa, , 68 Dusun, 162 Rukun Warga (RW), dan 383 Rukun Tetangga (RT). Keenam desa ini adalah Desa Bokoharjo, Madurejo, Sumberharjo, Gayamharjo, Wukirharjo, dan Sambirejo. Menurut data Dukcapil tahun 2021 jumlah penduduk Kapanewon Prambanan adalah sebesar 53.859 jiwa yang terdiri dari 26.573 jiwa laki-laki dan 27.286 jiwa perempuan.

### Hasil Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Oktober 2023 dengan total penyebaran sebanyak 248 responden dengan tingkat pengembalian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Kuesioner disebar	248	100
Kuesioner kembali	197	79
Kuesioner memenuhi syarat	181	73
Kuesioner tidak kembali	51	21



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kuesioner disebar sebanyak 248 kuesioner, sebanyak 197 kuesioner kembali, sebanyak 181 kuesioner yang memenuhi kriteria yang digunakan dan 51 kuesioner tidak kembali. Sampel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 181 responden.

## Karakteristik Responden

Karakteristik Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu menurut jenis kelamin, Pendidikan, lama bekerja dan jabatan.

Keterangan		Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	132	72,9%
	Perempuan	49	27,1%
Pendidikan	SMA/K	127	70,2%
	Diploma	32	17,7%
	Sarjana	9	5,0%
	Lainnya	13	7,2%
Lama Bekerja	1-5 tahun	53	29,3%
	6-10 tahun	52	28,7%
	>10 tahun	53	29,3%
	Lainnya	23	12,7%
Jabatan	Lurah	5	2,8%
	Carik	5	2,8%
	Kamituwo	7	3,9%
	Ulu-ulu	6	3,3%
	Jagabaya	7	3,9%
	Kaur Pangripta	5	2,8%
	Kaur Danarta	6	3,3%
	Kaur Tatalaksana	7	3,9%
	Dukuh	41	22,7%
	Staff	32	17,7%
	RW	13	7,2%
	RT	47	26,0%

Berdasarkan tabel diatas bahwa jenis kelamin didapatkan hasil responden terbanyak laki-laki yaitu sebanyak 132 orang dengan presentase 72,9% dan responden Perempuan sebanyak 49 orang dengan presentase 27,1%. Berdasarkan Pendidikan didapatkan hasil Pendidikan SMA/K adalah 127 responden dengan persentase 70,2%, pendidikan Diploma adalah 32 responden dengan persentase 17,7%, pendidikan Sarjana adalah 9 responden dengan persentase 5,0%, pendidikan Lainnya adalah 13 responden dengan persentase 7,2%. Maka dapat dikatakan bahwa

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki Pendidikan SMA/K dengan persentase 70,2%.

## Hasil Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengevaluasi validitas instrumen kuesioner yang digunakan. Uji Validitas ini dilaksanakan untuk menentukan apakah pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat menghasilkan respons yang sesuai dengan harapan dari subjek penelitian. Suatu pernyataan dikatakan valid jika hasil signifikansi kurang dari 0,05. Berikut hasil uji validitas:

Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Signifikansi</i>	Keterangan
X1.1	0,702	0,00	<i>Valid</i>
X1.2	0,639	0,00	<i>Valid</i>
X1.3	0,590	0,00	<i>Valid</i>
X1.4	0,619	0,00	<i>Valid</i>
X1.5	0,683	0,00	<i>Valid</i>
X1.6	0,684	0,00	<i>Valid</i>
X1.7	0,720	0,00	<i>Valid</i>
X1.8	0,756	0,00	<i>Valid</i>
X1.9	0,505	0,00	<i>Valid</i>
X1.10	0,638	0,00	<i>Valid</i>
X1.11	0,800	0,00	<i>Valid</i>
X2.1	0,714	0,00	<i>Valid</i>
X2.2	0,803	0,00	<i>Valid</i>
X2.3	0,751	0,00	<i>Valid</i>
X2.4	0,700	0,00	<i>Valid</i>
X2.5	0,834	0,00	<i>Valid</i>
X2.6	0,751	0,00	<i>Valid</i>
X3.1	0,505	0,00	<i>Valid</i>
X3.2	0,718	0,00	<i>Valid</i>
X3.3	0,601	0,00	<i>Valid</i>
X3.4	0,373	0,00	<i>Valid</i>
X3.5	0,683	0,00	<i>Valid</i>
X4.1	0,604	0,00	<i>Valid</i>
X4.2	0,678	0,00	<i>Valid</i>
X4.3	0,681	0,00	<i>Valid</i>
X4.4	0,844	0,00	<i>Valid</i>
X4.5	0,865	0,00	<i>Valid</i>
X5.1	0,694	0,00	<i>Valid</i>
X5.2	0,609	0,00	<i>Valid</i>
X5.3	0,681	0,00	<i>Valid</i>
X5.4	0,606	0,00	<i>Valid</i>

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

X5.5	0,634	0,00	<i>Valid</i>
X5.6	0,636	0,00	<i>Valid</i>
X5.7	0,692	0,00	<i>Valid</i>
X5.8	0,668	0,00	<i>Valid</i>
Y1.1	0,539	0,00	<i>Valid</i>
Y1.2	0,697	0,00	<i>Valid</i>
Y1.3	0,667	0,00	<i>Valid</i>
Y1.4	0,621	0,00	<i>Valid</i>
Y1.5	0,721	0,00	<i>Valid</i>
Y1.6	0,697	0,00	<i>Valid</i>

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai signifikansi (sig) dari korelasi antar variabel menunjukkan  $0,00 < 0,05$  (5%), maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan kuesioner dinyatakan *valid* dan mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur melalui kuesioner.

## Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menilai tingkat kehandalan kuesioner dengan indikator dari suatu variabel. Apabila tanggapan dari responden konsisten dan memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6, maka suatu variabel dianggap *reliabel* atau dapat diandalkan. berikut menampilkan temuan uji *reliabilitas* yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
<i>Akuntabilitas</i> Pengelolaan ADD	0,801	0,600	<i>Reliabel</i>
Transparansi	0,818	0,600	<i>Reliabel</i>
Kelembagaan Desa	0,849	0,600	<i>Reliabel</i>
Kebijakan Desa	0,812	0,600	<i>Reliabel</i>
Partisipasi Masyarakat	0,787	0,600	<i>Reliabel</i>
Kesejahteraan Masyarakat	0,845	0,600	<i>Reliabel</i>

Dari Tabel diatas, dapat disimpulkan uji *reliabilitas* diindikasikan oleh nilai *alpha* yang melebihi 0,6, dengan *koefisien alpha* X1 sebesar 0,801, X2 sebesar 0,818, X3 sebesar 0,848, X4 sebesar 0,812, X5 sebesar 0,787, dan Y sebesar 0,845. Terlihat dari konsistensi yang ditunjukkan pada setiap item pernyataan maka, semua variabel dapat dikatakan *reliabel* atau dapat dipercaya.

## Uji Statistik Deskriptif

Distribusi variabel dalam penelitiain diuraikan dengan statistic deskriptif. Memahami situasi dari penelitian dan populasi digunakan *mean* (rata-rata), *maksimum* (tertinggi), *minimum* (terendah), dan *standar deviasi* (variasu data dari

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rata-rata). Berikut menyajikan temuan *statistic deskriptif* yang digunakan dalam penelitian ini yang diolah dengan menggunakan *SPSS (Statistical Program for Sosial Science)*.

Vareabel	N	Minim	Maxi	Mean	Std Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan ADD (X1)	181	2,5	5,0	4,104	0,502
Transparansi (X2)	181	2,3	5,0	4,243	0,508
Kelembagaan Desa (X3)	181	2,4	5,0	3,671	0,517
Kebijakan Desa (X4)	181	2,0	5,0	4,055	0,559
Partisipasi Masyarakat (X5)	181	2,8	5,0	4,066	0,479
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	181	2,2	5,0	3,822	0,550
Valid N	181				

Dari Tabel 4.8, nilai variabel dihitung memanfaatkan skor dari setiap item pernyataan dalam kuesioner. Total sampel (N) mencapai 181 responden, dan nilai minimum variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah 2,5, 2,3 untuk transparansi (X2), 2,4 untuk kelembagaan desa (X3), 2,0 untuk kebijakan desa (X4), 2,8 untuk partisipasi masyarakat (X5), dan 2,2 untuk skor minimal kesejahteraan masyarakat (Y).

Nilai maximum Akuntabilitas Pengelolaan ADD (X1) adalah 5,0, Transparansi (X2) nilai maximum adalah 5,0, Kelembagaan Desa (X3) nilai maximum adalah 5,0, Kebijakan Desa (X4) nilai maximum adalah 5,0, Partisipasi Masyarakat (X5) nilai maximum adalah 5,0, dan Kesejahteraan Masyarakat (Y) nilai maximum adalah 5,0.

Nilai rata-rata variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1) adalah 4,104, Transparansi (X2) nilai rata-rata adalah 4,243, Kelembagaan Desa (X3) nilai rata-rata adalah 3,671, Kebijakan Desa (X4) nilai rata-rata adalah 4,055, Partisipasi Masyarakat (X5) nilai rata-rata adalah 4,066, dan diikuti variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) dengan nilai rata-rata adalah 3,822.

Semakin besar nilai standar deviasi data, jarak antara setiap titik data dan nilai rata-ratanya akan semakin besar. Pada tabel 4.6 Variabel Akuntabilitas Pengelolaan ADD (X1) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,502, variabel Transparansi (X2) memiliki standar deviasi sebesar 0,508, variabel Kelembagaan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Desa (X3) memiliki standar deviasi sebesar 0,517, variabel Kebijakan Desa (X4) memiliki standar deviasi sebesar 0,559, variabel Partisipasi Masyarakat (X5) memiliki standar deviasi sebesar 0,479, dan variabel Kesejahteraan Masyarakat memiliki standar deviasi sebesar 0,550.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji *Normalitas* bertujuan menentukan apakah distribusi variabel bebas dan variabel terkait bersifat normal atau tidak. Model regresi yang dapat terdistribusi normal merupakan model regresi yang baik. Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan program SPSS menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu sebagai berikut:

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		181
<i>Normal Parameter<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,000000
	<i>Std.Deviation</i>	0,46409973
Most Extreme Differences	<i>Absolute</i>	0,074
	<i>Positive</i>	0,050
	<i>Negative</i>	-0,074
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,002
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>		0,268

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.9 nilai *Asymp. Sig.* 0,268 maka, dikatakan hasil data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan komponen dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat interkorelasi (hubungan yang kuat antar variabel independen). Tidak adanya multikolinieritas atau interkorelasi antar variabel bebas merupakan tanda kuatnya model regresi. *Metoda Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya multikolinieritas. Tabel berikut menampilkan hasil uji multikolinieritas dengan program SPSS sebagai berikut:

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistic</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
<i>Akuntabilitas Pengelolaan ADD</i>	0,360	2,777	Tidak terjadi <i>multikolinieritas</i>

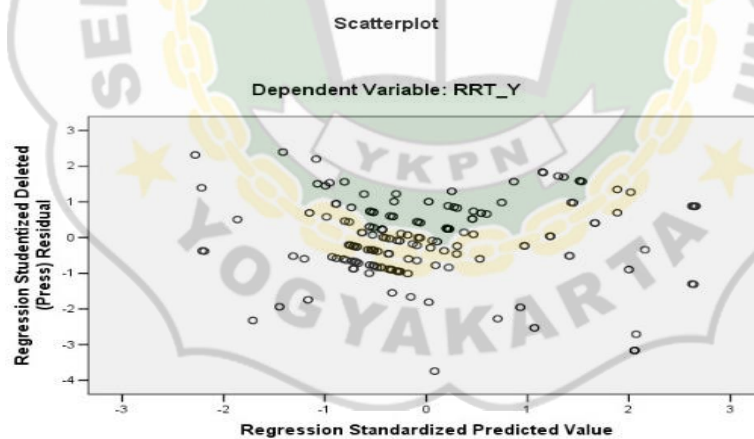
# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Transparansi	0,519	1,927	Tidak terjadi <i>multikolinearitas</i>
Kelembagaan Desa	0,794	1,260	Tidak terjadi <i>multikolinearitas</i>
Kebijakan Desa	0,467	2,140	Tidak terjadi <i>multikolinearitas</i>
Partisipasi Masyarakat	0,313	3,191	Tidak terjadi <i>multikolinearitas</i>

Dari perhitungan nilai *Tolerance* dalam tabel diatas, dapat dikatakan tidak terdapat tanda-tanda *multikolinearitas* karena nilai *toleransi variabel independent*  $> 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*  $< 10$ . Jadi, dapat disimpulkan dari nilai *tolerance* dan nilai VIF bahwa model *regresi* tidak menemukan korelasi antara variabel independen (X) dengan model regresi.

Dari perhitungan nilai *Tolerance* dalam Tabel 4.10, dapat dikatakan tidak terdapat tanda-tanda *multikolinearitas* karena nilai *toleransi variabel independent*  $> 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*  $< 10$ . Jadi, dapat disimpulkan dari nilai *tolerance* dan nilai VIF bahwa model *regresi* tidak menemukan korelasi antara variabel independen (X) dengan model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas



Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan menentukan apakah terdapat atau tidak ada konsistensi varian dari nilai *residual* untuk setiap pengamatan dalam model *regresi*. Heteroskedastisitas dapat mengakibatkan salah satu aspek dari model regresi linier menjadi kurang efisien dan akurat. Model regresi yang berkualitas baik dapat diidentifikasi dengan ketiadaan gejala *heteroskedastisitas*. Pengujian ini dapat dideteksi melalui penggunaan grafik plot atau *scatterplot*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dapat diamati pada gambar diatas bahwa titik-titik pada *scatterplot* tidak menunjukkan pola tertentu, dan tidak ada titik-titik di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, hasilnya menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

## Uji Model

### Uji F

Uji F atau *Good of Fit* model yang paling cocok digunakan karena bertujuan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam variabel akuntabilitas pengelolaan ADD (X1), Transparansi (X2), Kelembagaan Desa (X3), Kebijakan Desa (X4), dan Partisipasi Masyarakat (X5) terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y). Pengambilan kesimpulan diambil apabila probabilitas (signifikan)  $< 0,05$  ( $\alpha$ ) dan F hitung  $> F$  tabel maka, hipotesis terbukti. Cara mencari F tabel digunakan rumus  $(k-1)$  atau  $6-1 = 5$  sebagai derajat pembilang, sedangkan derajat penyebutnya adalah  $(n-k)$  atau  $181-5 = 176$  dengan tingkat probabilitas 5% dan hasilnya menunjukkan 2,27. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

<i>Model</i>		<i>Sum of Square</i>	<i>df</i>	<i>Means Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	15.622	5	3.124	14.103	0.000
	<i>Residual</i>	38.770	175	0.22		
	Total	54.392	180			

Hasil Analisis dari proses perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan didapat nilai F hitung sebesar 14,103, maka F hitung  $> F$  tabel atau  $14,103 > 2,27$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan ADD (X1), Transparansi (X2), Kelembagaan Desa (X3), Kebijakan Desa (X4), dan Partisipasi Masyarakat (X5) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

### Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi bertujuan mengukur sejauh mana variabel independent dalam regresi memperhitungkan garis regresi dan proporsi total varian dari variabel dependen. Berikut temuan dari analisis menggunakan uji  $R^2$  antar variabel independent terhadap variabel dependen:

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,536	0,287	0,267	0,471

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil uji koefisien determinasi, kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan ADD, transparansi, kelembagaan desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat sebesar 28,7%. Hasil uji menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,287, mengindikasikan kelima variabel independen berkontribusi sebesar 28,7% terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, faktor-faktor lain yang tidak diuji memiliki kontribusi sebesar 71,3% terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

## Hasil Uji Hipotesis

### Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda digunakan menilai sejauh mana pengaruh 2 (dua) atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan hasil uji *regresi linear* berganda yang dilakukan dengan program SPSS ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	1,049	0,356	2.942	0.004
	Akuntabilitas Pengelolaan ADD	-0,011	0,116	-0,091	0.928
	Transparansi	-0,008	0,096	-0.083	0.943
	Kelembagaan Desa	0,272	0,076	3.569	0.000
	Kebijakan Desa	0,132	0,092	2.439	0.032
	Partisipasi Masyarakat	0,324	0,131	2.473	0.014

Pada tabel diatas dapat disusun rumus:

$$Y = 1,049 - 0,011X_1 - 0,008X_2 + 0,272X_3 + 0,132X_4 + 0,324X_5 + e$$

Y= Kesejahteraan Masyarakat

X<sub>1</sub>= Akuntabilitas Pengelolaan ADD

X<sub>2</sub>= Trnsparansi

X<sub>3</sub>= Kelembagaan Desa

X<sub>4</sub>= Kebijakan Desa

X<sub>5</sub>= Partisipasi Masyarakat

e = Error

Persamaan *regresi linear* berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) 1,049 menyatakan bahwa jika variabel independen memiliki nilai yang sama dengan 0, maka nilai variabel dependen adalah sebesar 1,049.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Koefisien  $\beta_1 = -0,011$

Nilai koefisien regresi Akuntabilitas pengelolaan ADD adalah sebesar -0,011 dengan tanda negatif, artinya bahwa dengan peningkatan variabel Akuntabilitas pengelolaan ADD ( $X_1$ ) sebesar 1 satuan, maka kesejahteraan masyarakat menurun 1 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas pengelolaan ADD ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ).

3. Koefisien  $\beta_2 = -0,008$

Nilai koefisien regresi transparansi adalah sebesar -0,008 dengan tanda negati, artinya bahwa dengan peningkatan variabel transparansi ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan, maka kesejahteraan masyarakat menurun 1 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi ( $X_2$ ) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ).

4. Koefisien  $\beta_3 = 0,272$

Nilai koefisien regresi kelembagaan desa adalah 0,272 dengan tanda positif, artinya bahwa dengan peningkatan variabel kelembagaan desa ( $X_3$ ) sebesar 1 satuan, maka kesejahteraan masyarakat meningkat 1 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kelembagaan desa ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ).

5. Koefisien  $\beta_4 = 0,132$

Nilai koefisien regresi kebijakan desa adalah sebesar 0,132 dengan tanda positif, artinya jika terjadi peningkatan variabel kebijakan desa ( $X_4$ ) sebesar 1 satuan, maka kesejahteraan masyarakat meningkat 1 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa ( $X_4$ ) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ).

6. Koefisien  $\beta_5 = 0,324$

Nilai koefisien regresi partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,324 dengan tanda positif, artinya bahwa dengan peningkatan variabel partisipasi masyarakat ( $X_5$ ) sebesar 1 satuan, maka kesejahteraan masyarakat meningkat 1 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel partisipasi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masyarakat (X5) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial (sendiri) dan menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam uji nilai t, perbandingan akan dilakukan antara nilai t hitung dan nilai t tabel. Jika nilai t hitung  $>$  t tabel dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan secara individual variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dengan program SPSS ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	1,049	0,356	2.942	0.004
	Akuntabilitas Pengelolaan ADD	-0.011	0,116	-0,091	0.928
	Transparansi	-0,008	0,096	-0.083	0.943
	Kelembagaan Desa	0,272	0,076	3.569	0.000
	Kebijakan Desa	0,132	0,092	2.439	0.032
	Partisipasi Masyarakat	0,324	0,131	2.473	0.014

Berdasarkan uji t dengan menggunakan program SPSS pada tabel 4.14 dapat diartikan bahwa:

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas Pengelolaan ADD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan ADD memiliki nilai koefisien regresi - 0,011. Nilai negatif membuktikan adanya pengaruh negatif variabel Akuntabilitas Pengelolaan ADD terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,928 yang berarti lebih besar dengan 0,05 dan t hitung sebesar 0,091. nilai t hitung  $<$  dari t tabel (1,973) membuktikan H<sub>1</sub> ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

H<sub>2</sub>: Transparansi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel Transparansi memiliki nilai *koefisien regresi* sebesar -0,008. Nilai negatif membuktikan adanya pengaruh negatif variabel Transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan nilai *signifikansi* sebesar 0,943 yang berarti lebih besar dengan 0,05 dan *t* hitung sebesar 0,083. nilai *t* hitung < dari *t* tabel (1,973) membuktikan  $H_2$  ditolak artinya tidak ada pengaruh *signifikan* variabel Transparansi terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

$H_3$  : Kelembagaan desa berpengaruh positif *signifikan* terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Variabel kelembagaan desa ( $X_3$ ) memiliki nilai *koefisien regresi* sebesar 0,272 dan nilai *signifikan*  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan nilai *t* statistik sebesar 3,569 yang memenuhi syarat  $> t$  tabel (1,973) dapat disimpulkan bahwa kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya,  $H_3$  pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

$H_4$  : Pengaruh variabel Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Variabel kebijakan desa ( $X_4$ ) memiliki nilai *koefisien regresi* sebesar 0,132 dan nilai *signifikan*  $0,032 < 0,05$ . Sedangkan nilai *t* statistik sebesar 2,439 yang memenuhi syarat  $> t$  tabel (1,973) sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya,  $H_4$  pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

$H_5$  : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Variabel Partisipasi Masyarakat ( $X_5$ ) memiliki nilai *koefisien regresi* 0,324 dan nilai *signifikan*  $X_5$  adalah  $0,014 < 0,05$ . Sedangkan nilai *t* statistik sebesar 2,473 yang memenuhi syarat  $> t$  tabel (1,973), sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya,  $H_5$  pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

## **Pembahasan Hasil**

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan program SPSS variabel Akuntabilitas Pengelolaan ADD dan Transparansi menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal tersebut diakibatkan karena pengetahuan masyarakat tentang laporan penggunaan ADD masih terbatas dan diakibatkan karena proses pertanggungjawaban laporan dana

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

desa hanya dilakukan oleh aparat desa dan organisasinya, biarpun kedua hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khasanah, A. N., & Marisan, (2022) yang berjudul Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yang hasilnya Akuntabilitas Pengelolaan ADD tidak berpengaruh *signifikan* terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Asyik (2019) dan Kuswanti, Kurinia (2020) yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan program SPSS variabel Kelembagaan Desa, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin meningkatnya variabel kelembagaan desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat akan berpengaruh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diakibatkan karena adanya kelembagaan desa yang lengkap akan mempermudah penyelenggaraan kegiatan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, adanya kebijakan desa selaras atau sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat dibuktikan adanya tuntutan masyarakat yang dituangkan pada RPJMDes. Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Emylia dan Mildawati (2019) dengan judul Pengaruh *Akuntabilitas* Pengelolaan ADD, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan hasil Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan dengan kesejahteraan masyarakat, penelitian Sari, Mildawati (2019) yang menunjukkan hasil kebijakan desa berpengaruh *signifikan* terhadap kesejahteraan masyarakat, dan penelitiannya Kuswanti, Kurnia (2020) yang menunjukkan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Akuntabilitas pengelolaan ADD dan Transparansi tidak berpengaruh kepada Kesejahteraan Masyarakat, untuk variabel Kelembagaan Desa,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kejrikan Desa, dan Partisipasi Masyarakat memberi dukungan kepada teori keagenan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dapat dilihat dari terjalannya program perbaikan sarana prasarana di desa seperti, perbaikan jalan, Pembangunan irigari, Pembangunan pos ronda, dan lain sebagainya. Tak hanya dalam pemabangunan sarana dan prasarana partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kontribusi dalam pengambilan keputusan masalah, karena masyarakat yang lebih paham akan kebutuhan desa mereka.

## **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin membuat penulisan ini kurang sempurna, diantaranya yaitu:

1. Sesuai dengan tema yang diambil, maka pengukuran penelitian hanya dilakukan dengan berdasar dari hasil kuesioner yang disebar oleh peneliti Dimana hasil dari kuesioner ini tergantung pada responden yang menjawab pertanyaan ini.
2. Keterbatasan waktu sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal.
3. Dalam pengisian kuisoner, sampel yang kami tuju tidak semua mau untuk mengisi.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk peneliti adalah untuk meningkatkan kecanggihan penelitian ini sehingga dapat menjadi topik penelitian yang menarik untuk studi masa depan dan menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Untuk pemerinta desa, agar mengupayakan atau memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya akuntabilitas penelolan aloksasi dana desa dan transparansi. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat arti pentingnya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk masyarakat, seharusnya masyarakat lebih aktif berpartisipasi dan memiliki kesadaran pentingnya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi yang dilakukan pemerintah desa tidak hanya memenuhi persyaratan penerapan peraturan yang berlaku.

3. Untuk peneliti selanjutnya, untuk memberikan jawaban yang lebih rinci dan terpercaya diharapkan agar menggunakan indikator lainnya, menambahkan variabel independen lain yang mungkin berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, dan melakukan inovasi dalam kuisioner penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari. (2010). *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Alghifari. (2015). *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit penerbitan dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajaemen YKPN.
- Algifari. (2016). *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Ardelia, & Handayani. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(4), 1-16.
- Arliman. (2019). Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan uang desa pasca undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Arena Hukum*, 12(2), 296-317.
- Asyik. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Emyilia, & Mildawati. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 8(6).
- Ghozali. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.
- Hadi. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masyarakat: Study kasus Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Hadi. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat: Study kasus Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Jensen, & Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate governance* (pp. 77-132).

Khasanah, & Marisan. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32-48.

Khasanah, A. N. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *urnal Rekognisi Akuntansi*.

Kurniawati, & Pangayouw. (2017). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(2), 77-87.

Kuswanti, & Kurnia. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).

Mardiasmo. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. *ejournal.unsrat.ac.id*.

Novitasari, & Asyik. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(9).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan.* (2019). DIY.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .* (2014). Jakarta.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 18 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.* (2007). Jakarta.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan .* (2007). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* (2014). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.* (2005). Jakarta.
- Putri, A., Sudiana, I., & Putra, I. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli . *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* , 699-730.
- Sari, & Mildawati. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12), 1-17.
- Sengaji, & Asyik. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi (JIRA)*, 7(3).
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta.
- Sugista. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa. *digilib.unila.ac.id*.
- Sugista. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Susliyanti, & Binawati. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (2009). Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta.

Winarsih, Subhan, & Nengsih. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 142-157.

Winarsih, Subhan, & Nengsih. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo.

Yupita, & Juita. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 56-64.